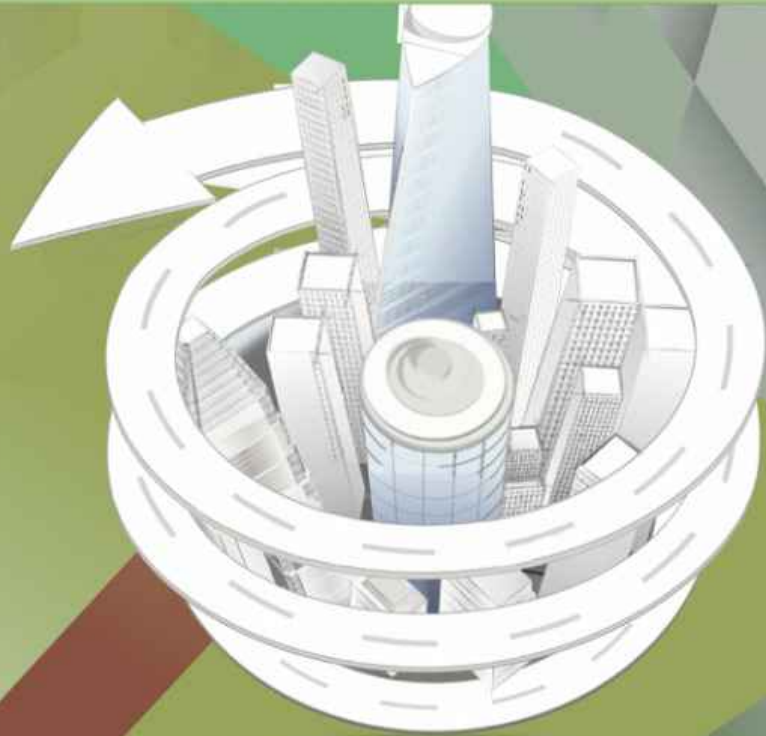




BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

# **EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019**



**Samarinda, Januari 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya laporan pelaksanaan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 untuk triwulan IV atau semester II Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Timur pada Kegiatan Pengendalian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan.

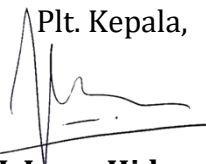
Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah mengetahui capaian target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dan capaian target indikator kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sampai dengan triwulan IV atau Semester II Tahun 2019. Dari laporan ini mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam penyusunan RKPD selanjutnya.

Semoga laporan kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan Pengendalian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Samarinda, 20 Januari 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Plt. Kepala,



**Drs. H. Iman Hidayat, M.Si.**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP.19620724 198603 1 014

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	4
1.3. Sumber Data .....	4
1.4. Metode Evaluasi .....	5
<b>BAB II : PENJABARAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023 .....</b>	<b>6</b>
2.1. Gambaran Umum .....	6
2.2. Visi Dan Misi RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019 – 2023 .....	7
2.3. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019.....	14
<b>BAB III : HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2019 DAN CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023 ...</b>	<b>17</b>
3.1. Realisasi Capaian Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.....	17
3.2. Konsistensi Penjabaran Program RPJMD.....	18
3.3. Konsistensi Pelaksanaan Kegiatan Rentra-PD .....	25
3.4. Capaian Kinerja RPJMD Dan RKPD. ....	28
3.5. Pelaksanaan Bidang Urusan Pemerintahan. ....	34
<b>BAB IV : FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PELAK- SANAAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018</b>	<b>39</b>
4.1. Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 .....	39
4.2. Faktor Pendorong Pelaksanaan RKPD Tahun 2019.....	40
4.3. Target Dan Realisasi Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	40

<b>BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>47</b>
5.1. Kesimpulan .....	47
5.2. Rekomendasi (Upaya Tindak Lanjut) .....	48

## **LAMPIRAN**

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mempercepat penguatan ekonomi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata yang merupakan tujuan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa rencana pembangunan telah disusun dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten serta mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), serta rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja).

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari :

- a. Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, yaitu pemantauan dan supervisi terhadap tahapan perencanaan, perumusan, dan penyajian kebijakan pembangunan daerah dalam rangka terwujudnya rencana pembangunan daerah yang baik.
- b. Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, yaitu pemantauan dan supervisi terhadap perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka identifikasi serta antisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, yaitu penilaian hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mengukur pencapaian kinerja perangkat daerah (PD) dan keberhasilan pembangunan daerah.

---

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan bertujuan untuk memastikan:

- 1) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Konsistensi kebijakan pembangunan daerah;
- 3) Konsistensi antara kebijakan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah (PD);
- 4) Konsistensi antara kebijakan pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/kota;
- 5) Konsistensi kebijakan pembangunan antar daerah; dan
- 6) Konsistensi antara kebijakan pembangunan nasional dengan daerah.

Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah bertujuan untuk:

- 1) Menjamin konsistensi pelaksanaan RPJMD kedalam RKPD dan Renstra-PD kedalam Renja-PD;
- 2) Menjamin konsistensi RKPD, KUA-PPAS, dan APBD serta antara Renja-PD, RKA-PD, dan DPA-PD;
- 3) Memastikan realisasi target kinerja (*output*) dan penyerapan dana kegiatan RKPD dan Renja-PD;
- 4) Mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran kegiatan RKPD dan Renja-PD;
- 5) Melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, atau pun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah bertujuan untuk:

- 1) Memastikan bahwa pagu indikatif kegiatan telah digunakan dengan efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja (*output*) dalam RKPD dan Renja-PD;
- 2) Memastikan bahwa target kinerja kegiatan (*output*) dicapai dan efektif mendorong tercapainya target kinerja program (*outcome*) dalam Renstra-PD dan RPJMD;
- 3) Memastikan bahwa sasaran pembangunan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang daerah (*impact*) dapat dicapai serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

---

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pengendalian perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah pada saat penyusunan dokumen rencana. Sedangkan untuk evaluasi hasil pelaksanaan dilaksanakan secara berkala, yang dimulai dari evaluasi hasil pelaksanaan RKPD setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2019.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019. Evaluasi RKPD Tahun 2019 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja-PD yang disampaikan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) dengan melakukan evaluasi capaian RKPD terhadap target selama periode 2019-2023.

Secara umum, maksud dan tujuan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV Tahun 2019 adalah untuk :

- a. Memperoleh gambaran konsistensi perencanaan dan penganggaran PD Tahun 2019;
- b. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan IV Tahun 2019;
- c. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019;
- d. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan untuk optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dalam RKPD Tahun 2021;
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

---

Hasil evaluasi Triwulan IV RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 digunakan sebagai :

- a. Masukan untuk penyusunan RKPD dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
- b. Penilaian progres kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penilaian progres kinerja Perangkat Daerah; dan
- d. Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

## **1.2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) yang dilakukan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk memastikan dan menilai:

- a. Konsistensi penjabaran RPJMD atau pelaksanaan Renstra-PD;
- b. Konsistensi indikator, target dan pagu indikatif program maupun kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran;
- c. Realisasi kinerja *output* maupun realisasi keuangan setiap kegiatan pada RKPD Tahun 2019;
- d. Faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja RKPD tahun 2019.

Pengendalian dan evaluasi RKPD dilaksanakan pada seluruh PD yang menyampaikan hasil evaluasi Renja-PD pada sistem aplikasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun masih memiliki catatan berupa belum optimalnya kesadaran Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu.

## **1.3 SUMBER DATA**

Sumber data dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Renstra-PD Tahun 2019, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, Renja-PD Tahun 2019, APBD Tahun 2019, serta hasil evaluasi Renja seluruh perangkat daerah.



---

#### **1.4 METODE PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pengendalian dan Evaluasi dilakukan dengan membandingkan indikator, target kinerja, dan realisasi setiap program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen yang di evaluasi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2019 mengacu pada RPJMD 2019-2023 dengan total program prioritas sebanyak 70 program dan mengevaluasi data Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

---

## **BAB II**

# **PENJABARAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

---

### **2.1 GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019 – 2023 melalui berbagai tahapan berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sangat strategis karena menjadi dokumen perencanaan yang menghubungkan antara RPJMD Tahap III Tahun 2013-2018 dengan RPJMD Tahap IV Tahun 2018-2023. Sesuai tahapan RPJPD, tahun 2019 merupakan tahapan transisi periodisasi RPJMD IV Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 2019-2023) dimana RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

---

Tahun 2013-2018 berakhir pada tahun 2018 sedangkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 belum ditetapkan. Maka RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 harus mampu menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah disusun berdasarkan pada dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 dengan memerhatikan RPJMN Tahun 2014-2019.

## **2.2 VISI DAN MISI RPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2019 – 2023**

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur telah selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2023 yaitu:

**“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

---

**Misi 1 : Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas**

Kalimantan Timur memiliki kekayaan alam yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, namun dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai. Tidak meratanya distribusi jumlah dan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur menjadi tantangan yang perlu dikedepankan, agar semakin meningkatkan daya saing provinsi, baik secara regional, nasional dan internasional.

Perkembangan global, baik politik maupun teknologi, dapat memberikan dampak yang nyata dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Kalimantan Timur. Rendahnya produktivitas menjadi tantangan, yang dapat dijawab melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan pengetahuan dan teknologi yang lebih efektif dan efisien berdampak rendah terhadap lingkungan hidup.

Arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi melalui pengembangan pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Timur baik pendidikan formal di sekolah, pendidikan vokasi, maupun pendidikan informal di luar sekolah. Peran serta perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas semakin ditingkatkan, untuk memberikan keadilan bagi seluruh warga Kalimantan Timur. Sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup akan tetapi diperlukan juga sumber daya manusia yang berakhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter manusia yang berkualitas. Pendidikan agama dan integrasi budaya lokal penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan baik aspek jasmani (pangan, sandang, dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan karakter, mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.

---

## **Misi 2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan**

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak beberapa dasawarsa telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang kokoh dan berkualitas. Dalam hal penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor primer. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih mengandalkan produk barang mentah (*raw material*) dan belum pada barang olahan (*processed product*). Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Produktivitas kawasan yang rendah, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan bercadangan karbon rendah, utamanya untuk kehutanan dan perkebunan, serta belum optimalnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan, menjadi tantangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Belum terbangunnya industri hilir (sekunder-tercier) hasil pertanian dalam arti luas, menjadikan nilai tambah komoditi Kalimantan Timur belum memberikan hasil yang optimum. Selain itu, belum adanya terminal-terminal distribusi hasil pertanian dalam arti luas, dan belum tersedianya sentra industri perikanan, menjadikan Kalimantan Timur kehilangan potensi pendapatan daerah.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi persoalan dalam kegiatan ekonomi Kalimantan Timur. Kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur relatif masih tinggi. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, pendidikan, dan berbagai modal lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini. Rasio Gini Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun 2013-2017 berfluktuasi dan memperlihatkan kecenderungan stabil pada angka 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur juga relatif masih melebar.

---

Dalam konteks mewujudkan daya saing ekonomi, tantangan yang dihadapi adalah membangun keterkaitan antara hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang. Percepatan transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu adanya perubahan pola pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, upaya mempersiapkan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang antara ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam terbarukan secara sistematis dibutuhkan upaya keras yang terintegrasi mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, serta mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar pembangunan dengan fokus pada struktur ekonomi berbasis sekunder dan tersier. Di masa mendatang, Provinsi Kalimantan Timur mendorong lahirnya industri hilir agar hasil eksploitasi sumber daya alam yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur tidak diekspor dalam bentuk mentah namun sudah dalam bentuk produk olahan baik berupa barang setengah jadi maupun barang jadi dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Hal yang ingin dicapai dalam konteks ekonomi yang berkerakyatan dalam misi kedua adalah terciptanya sistem ekonomi partisipatif yang meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Upaya bantuan modal usaha, pendampingan teknis dan manajerial, serta bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah akan semakin ditingkatkan. Ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya dan strategi untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraannya, serta memperkuat BUMDES sebagai penggerak perekonomian pedesaan. Pembangunan dan pengembangan ekonomi harus berakar pada ekonomi kerakyatan namun tetap mengacu pada pertumbuhan, pemerataan, stabilitas, dan peningkatan sumber daya manusia dengan cara mempercepat proses perubahan dari masyarakat yang masih berfikir dan berperilaku tradisional ke masyarakat modern; dari sistem ekonomi

---

subsistem ke ekonomi pasar; dan dari masyarakat yang tergantung ke masyarakat yang mandiri. Penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan dilakukan melalui berbagai skema yang dimungkinkan di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menguatkan kemitraan antara perusahaan dengan kelompok ekonomi masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan rakyat tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing, dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, kepastian berusaha, dukungan permodalan dan teknologi, usaha pertanian rakyat, serta peran BUMDES dan koperasi sejati yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi dalam melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan dibawah kepemimpinan dan kepemilikan anggota masyarakat.

### **Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan**

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur secara merata. Kualitas infrastruktur yang belum memadai menjadi problem daya saing di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah, dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan jalan dengan kapasitas di atas 10 Ton pada jalan provinsi dan jalan produksi lainnya dalam rangka menghubungkan sentra-sentra produksi dan kawasan pertumbuhan ekonomi

---

menuju pusat pemasaran outlet. Penyediaan transportasi udara dan laut yang handal serta representatif untuk meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Provinsi Kalimantan Timur, sebagai upaya pembukaan keterisolasian wilayah dengan dikembangkannya sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga, pembangunan bandar udara serta penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi. Disamping itu pemenuhan kecukupan layanan air minum, air baku untuk jaringan irigasi dan kawasan industri serta infrastruktur pertanian melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan, penyediaan perumahan sederhana, layak huni dan sehat diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam konteks energi terbarukan, misi ini tidak terlepas dari konsep pembangunan ekonomi hijau. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan strategi besar mewujudkan ketahanan energy melalui pengembangan sumber energy baru terbarukan (EBT).

#### **Misi 4 : Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**

Tranformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau atau ekonomi yang rendah karbon akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Sebagai upaya untuk mendukung ekonomi hijau, maka komitmen terhadap perbaikan lingkungan, rasionalisasi dan harmonisasi penataan ruang (RTRW) untuk memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan ekosistem menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kualitas lingkungan menjadi salah satu upaya *balancing* terhadap pembangunan ekonomi agar berdimensi “berkelanjutan”. Fenomena iklim saat ini tidak bisa terprediksi sehingga adaptasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan, khususnya yang terkait dengan strategi pembangunan sektor kesehatan, pertanian, permukiman, dan tata ruang. Dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.



---

Masyarakat juga harus terlibat langsung dalam upaya menjaga dan merawat lingkungan di masa perubahan iklim yang tidak menentu ini.

Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengantisipasi risiko bencana, agar dapat memiliki kesiapsiagaan, sarana-prasarana pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, serta memastikan pemulihan pasca bencana yang lebih baik, yang keseluruhnya diintegrasikan dalam perencanaan keruangan (RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang kawasan hingga tingkat Desa), rencana pembangunan (RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota, dan RPJM Desa), serta sektor-sektor lainnya, seperti infrastruktur, pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

**Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.**

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar *good governance*. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Setidaknya ada Sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu; 1) Tidak ada korupsi; 2) Tidak ada pelanggaran hukum; 3) APBD baik; 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik; 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap; 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik; 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif; 8) Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah; dan 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

---

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah provinsi melakukan harmonisasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui keterbukaan layanan informasi publik dan menguatkan akuntabilitas serta kecepatan layanan perijinan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat semakin meningkat.

### **2.3 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019**

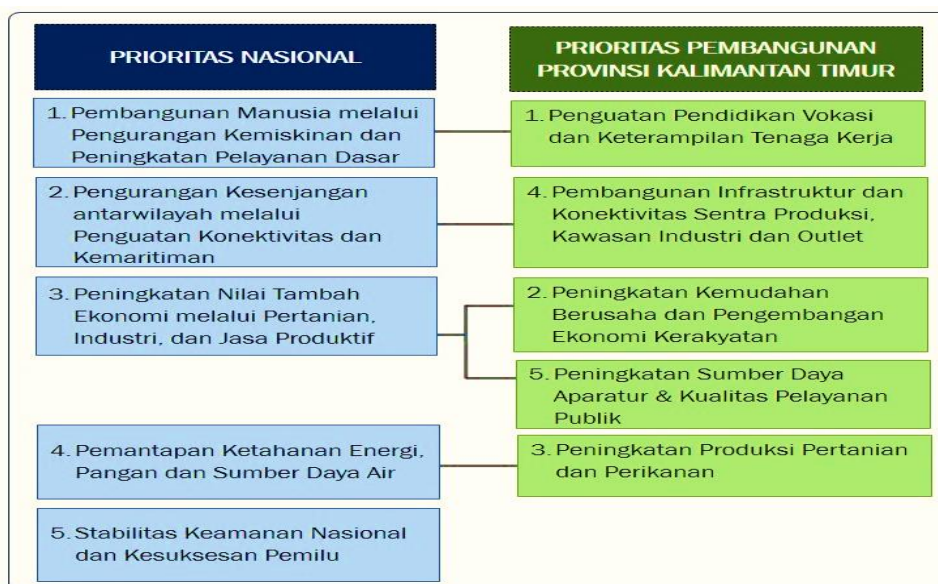
Prioritas pembangunan Kalimantan Timur tahun 2019 disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan interpretasi/arahan tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2018-2023. Prioritas Pembangunan pada RKPD merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian menjadi sasaran utama pada tema RKPD 2019. Sesuai dengan Tema RKPD 2019 **“Memperkuat Daya Saing Investasi untuk Mempercepat Hilirisasi Industri”**, maka kata kunci pada tema tersebut adalah Daya Saing Investasi. Dengan memahami permasalahan pada daya saing investasi di Kalimantan Timur maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah :

- 1. Penguatan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan;**
- 2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;**
- 3. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan;**
- 4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Sentra Produksi, Kawasan Industri dan Outlet;**
- 5. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik.**

Prioritas pembangunan Kalimantan Timur tahun 2019 juga disusun dengan mempedomani pada prioritas nasional pada RKP tahun 2019. Beberapa prioritas nasional dan prioritas pembangunan di Kalimantan Timur pada tahun 2019 memiliki

keterkaitan dalam rangka mendukung tercapainya prioritas nasional. Namun ada beberapa prioritas nasional yang tidak masuk dalam prioritas pembangunan Kalimantan Timur seperti Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, namun dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sudah terdapat unsur yang mendukung penguatan konektivitas dan kemaritiman seperti pembangunan jalan dan jembatan pada daerah 3T. Demikian pula pada Prioritas Nasional Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

**Gambar 2.1**  
**Keterkaitan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019**



Memperhatikan dan mempedomani sasaran pembangunan pada RKP tahun 2019 dan RPJPD tahap IV, maka sasaran pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator	Target RKPD 2019
1	Meningkatkan kemadiran ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,5±1
		Investasi (Triliun Rp)	42
		Tingkat Inflasi (%)	4±1
2	Meningkatnya daya saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia	75,30
3	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	0,329
		Indeks Williamson	0,45
4	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	12
5	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,5
6	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,02
7	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00
8	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,54
9		Jalan dalam kondisi mantap (%)	56,89

No	Sasaran	Indikator	Target RKPD 2019
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar	Rasio Elektrifikasi (%)	80,50
10	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan	Kontribusi sektor industri pengolahan (%)	20,30
		Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%)	5,00
		Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang terhubung (koneksi)	2
11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi Sub sektor perkebunan (%)	4,50
		Kontribusi Sub sektor perikanan (%)	1,60
12	Meningkatnya kemandirian pangan	Rasio pemenuhan daging sapi lokal (%)	27,60
		Rasio pemenuhan kebutuhan beras (%)	65
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan emisi GRK (ton CO2Eq)	12,16
14	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	IKM	85
15	Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN	Jumlah PD yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2

**BAB III**

# **HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2019 DAN CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dicantumkan pada lampiran dalam laporan ini diuraikan hal-hal sebagai berikut:

## **3.1 REALISASI CAPAIAN SASARAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019**

Realisasi capaian sasaran RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2019 Sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1  
Target dan Sasaran Serta Capaian RKPD 2019  
(Triwulan IV Tahun 2019)**

No	Sasaran	Indikator	Target RKPD 2019	Realiasi Triwulan IV 2019
1	Meningkatkan kemadirian ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,5±1	5,93*
		Investasi (Triliun Rp)	42	25,21*
		Tingkat Inflasi (%)	4±1	1,66
2	Meningkatnya daya saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia	75,30	75,83**
3	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	0,329	0,335
		Indeks Williamson	0,45	0,50**
4	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	12	9,48**
5	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,5	66,44
6	Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,02	73,96**
7	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	5,91
8	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,54	6,09
9	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar	Jalan dalam kondisi mantap (%)	56,89	52,85*
		Rasio Elektrifikasi (%)	80,50	85*
10	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan	Kontribusi sektor industri pengolahan (%)	20,30	17,81*
		Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran (%)	5,00	5,94*
		Jumlah Kawasan Strategis Provinsi yang terhubung (koneksi)	2	-
11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi Sub sektor perkebunan (%)	4,50	4,33**
		Kontribusi Sub sektor perikanan (%)	1,60	1,48**

No	Sasaran	Indikator	Target RKPD 2019	Realiasi Triwulan IV 2019
12	Meningkatnya kemandirian pangan	Rasio pemenuhan daging sapi lokal (%)	27,60	-
		Rasio pemenuhan kebutuhan beras (%)	65	75**
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan emisi GRK (ton CO2Eq)	12,16	15,55*
14	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	IKM	85	81
15	Terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas KKN	Jumlah PD yang ditetapkan seb c. bd vcagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2	1

\*Capaian s/d TW III Tahun 2019

\*\* Capaian Tahun 2018

### 3.2 KONSISTENSI PENJABARAN PROGRAM RPJMD

Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, Renja-PD, dan APBD Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 1 :

**Tabel 3.2**  
**Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD, RENJA-PD, dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program			Konsistensi Program			In – Konsistensi Program		
		RPJMD/ Renstra	RKPD/Renja 2019	APBD 2019	Renstra - Renja	Renstra - APBD	Renja - APBD	Renstra - Renja	Renstra - APBD	Renja - APBD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Badan Kepegawaian Daerah	5	5	5	5	5	5	0	0	0
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	8	8	8	8	8	0	0	0
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	7	7	7	7	7	0	0	0
4	Badan Pendapatan Daerah	9	9	9	9	9	9	0	0	0
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	8	8	8	8	8	8	0	0	0
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	6	6	6	6	6	0	0	0
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	7	7	7	7	7	0	0	0
8	Badan Penghubung Provinsi	6	6	6	6	6	6	0	0	0
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	10	10	9	9	10	3	3	0
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10	10	10	10	10	10	0	0	0
11	Dinas Kehutanan	16	17	16	16	16	16	1	0	1
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	11	11	11	11	11	11	0	0	0
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16	15	16	15	16	15	1	0	1
14	Dinas Kesehatan	15	14	15	14	15	14	1	0	1
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	4	11	4	11	4	7	0	7
16	Dinas Lingkungan Hidup	14	14	14	14	14	14	0	0	0
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	12	13	13	12	12	12	1	1	2
18	Dinas Pariwisata	8	8	8	8	8	8	0	0	0
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	13	13	13	13	13	13	0	0	0

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program			Konsistensi Program			In – Konsistensi Program		
		RPJMD/ Renstra	RKPD/Renja 2019	APBD 2019	Renstra - Renja	Renstra - APBD	Renja - APBD	Renstra - Renja	Renstra - APBD	Renja - APBD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	13	13	13	13	13	13	0	0	0
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	9	8	9	8	9	8	1	0	1
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	9	9	9	9	9	0	0	0
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15	12	12	12	12	12	3	3	0
24	Dinas Perhubungan	8	8	8	8	8	8	0	0	0
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	15	15	15	14	15	14	2	0	2
26	Dinas Perkebunan	23	23	23	23	23	23	0	0	0
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	9	9	9	9	9	9	0	0	0
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10	8	10	8	10	8	2	0	2
29	Dinas Sosial	13	11	13	11	13	11	2	0	2
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	12	9	9	9	9	3	0	3
31	Inspektorat	12	10	10	10	10	10	2	2	0
32	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	6	3	6	3	6	3	3	0	3
33	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	4	2	3	2	3	2	2	1	1
34	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	8	6	8	4	8	4	6	0	6
35	Satuan Polisi Pamong Praja	8	8	8	8	8	8	0	0	0
36	Sekretariat Daerah	39	39	39	39	39	39	0	0	0
37	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	8	4	5	4	5	4	4	3	1
38	Sekretariat DPRD	5	5	5	5	5	5	0	0	0
TOTAL		416	390	407	381	405	382	44	13	33

**Catatan:**

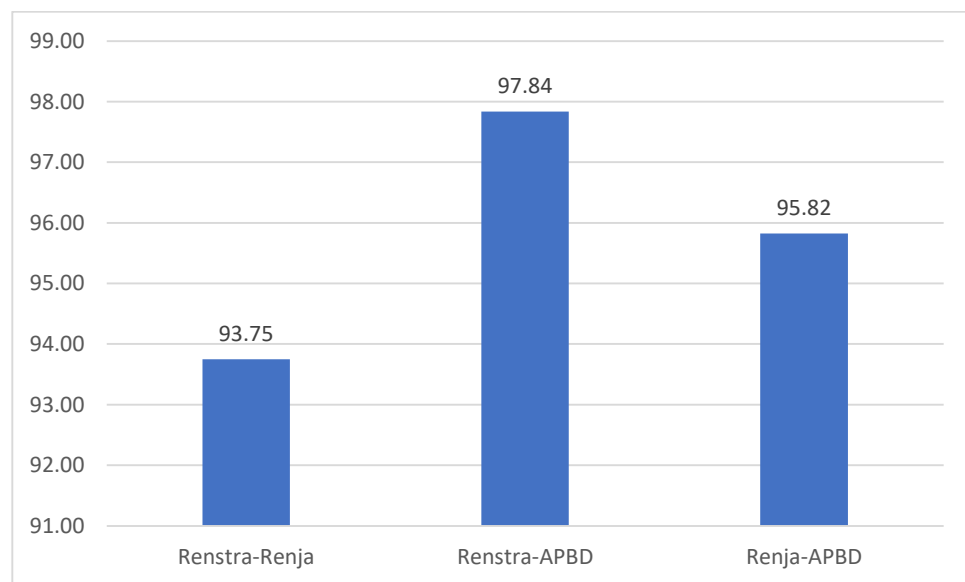
1. Angka pada kolom 3 s/d 5 adalah jumlah program pada setiap PD;
2. Angka pada kolom 6 s/d 8 adalah jumlah program yang konsisten antar dokumen pada masing-masing PD;
3. Angka pada kolom 9 s/d 11 menunjukkan jumlah program yang tidak sama antar dokumen sebagaimana dimaksud.

Dari tabel diatas diperoleh data dan informasi antara lain sebagai berikut:

- a. Pada RPJMD terdapat sejumlah 416 program yang direncanakan pada tahun 2019, serta sejumlah 381 program yang terdapat pada RKPD dan RENJA PD Tahun 2019. Sedangkan program yang dilaksanakan dalam APBD Tahun 2019 sebanyak 405 program;

- b. Sebanyak 44 program dalam RPJMD/Renstra yang tidak dijabarkan pada RKPD;
- c. Sebanyak 13 program dalam RPJMD/Renstra yang tidak dijabarkan pada APBD;
- d. Tidak terdapat perbedaan jumlah program pada RKPD dan Renja-PD;
- e. Sebanyak 8 program dalam RKPD Perubahan yang tidak terdapat dalam APBD Perubahan Tahun 2019, dan sebanyak 4 program dalam APBD Perubahan yang tidak terdapat dalam RKPD Perubahan;
- f. Sebanyak 21 PD memiliki jumlah program yang sesuai/konsisten pada seluruh dokumen;
- g. Indikator dan target program yang dimuat pada masing-masing dokumen masih ditemukan perbedaan pada beberapa PD.

Konsistensi antar dokumen dalam penjabaran/pelaksanaan program digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 3.1**  
**Konsistensi Program Antar Dokumen Tahun 2019**

Disamping konsistensi program, perlu dilihat pula konsistensi pagu indikatif RPJMD ke dalam Renstra-PD, RKPD, Renja-PD dan APBD. Konsistensi pagu indikatif RPJMD dengan Renstra-PD terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Penjabaran Pagu Indikatif Program RPJMD ke dalam Renstra-PD**  
**Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun 2019**



No	Perangkat Daerah	Total Pagu RPJMD/Renstra PD (2019 - 2023)	Pagu Renstra 2019	Selisih Pagu
1	Badan Kepegawaian Daerah	41.617.294.000,00	20.550.000.000,00	21.067.294.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.339.000.000,00	6.636.400.000,00	11.702.600.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.326.000.000,00	3.515.400.000,00	14.810.600.000,00
4	Badan Pendapatan Daerah	119.378.862.000,00	47.918.292.000,00	71.460.570.000,00
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	9.700.000.000,00	3.803.100.000,00	5.896.900.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	90.779.840.000,00	45.389.920.000,00	45.389.920.000,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	59.939.582.000,00	30.813.000.000,00	29.126.582.000,00
8	Badan Penghubung Provinsi	18.400.400.000,00	9.200.200.000,00	9.200.200.000,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	96.100.000.000,00	48.050.000.000,00	48.050.000.000,00
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	144.703.320.000,00	17.861.800.000,00	126.841.520.000,00
11	Dinas Kehutanan	656.430.115.500,00	297.205.957.750,00	359.224.157.750,00
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	114.311.837.620,00	44.630.495.000,00	69.681.342.620,00
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.235.000.000,00	8.671.072.000,00	14.563.928.000,00
14	Dinas Kesehatan	241.476.862.000,00	116.142.099.000,00	125.334.763.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	45.000.000.000,00	12.550.000.000,00	32.450.000.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	44.210.000.000,00	18.052.648.000,00	26.157.352.000,00
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	99.967.383.000,00	45.695.627.000,00	54.271.756.000,00
18	Dinas Pariwisata	30.000.000.000,00	12.817.000.000,00	17.183.000.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	7.192.238.548.400,00	1.172.127.665.750,00	6.020.110.882.650,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	23.875.250.000,00	7.050.000.000,00	16.825.250.000,00
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	106.891.084.000,00	34.381.000.000,00	72.510.084.000,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.000.000.000,00	9.924.535.000,00	25.075.465.000,00
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.357.397.352.500,00	891.688.980.675,00	1.465.708.371.825,00
24	Dinas Perhubungan	196.000.000.000,00	41.780.446.500,00	154.219.553.500,00
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	75.038.050.000,00	31.722.281.000,00	43.315.769.000,00
26	Dinas Perkebunan	85.856.229.330,00	32.897.850.000,00	52.958.379.330,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	23.659.714.000,00	5.275.000.000,00	18.384.714.000,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	76.615.000.000,00	32.167.900.000,00	44.447.100.000,00
29	Dinas Sosial	64.000.000.000,00	19.150.000.000,00	44.850.000.000,00
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	58.000.000.000,00	20.050.000.000,00	37.950.000.000,00
31	Inspektorat	30.025.680.000,00	15.012.840.000,00	15.012.840.000,00
32	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	1.016.406.288.000,00	486.680.840.000,00	529.725.448.000,00
33	RSUD dr. Kanujoso Djiatibowo di Balikpapan	506.174.738.000,00	235.498.000.000,00	270.676.738.000,00
34	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	99.475.510.000,00	35.832.515.750,00	63.642.994.250,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja	24.475.000.000,00	10.925.852.500,00	13.549.147.500,00
36	Sekretariat Daerah	350.264.608.000,00	172.032.304.000,00	178.232.304.000,00
37	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	15.300.000.000,00	6.700.000.000,00	8.600.000.000,00
38	Sekretariat DPRD	192.050.000.000,00	96.025.000.000,00	96.025.000.000,00
TOTAL		14.400.658.548.350	4.146.426.021.925	10.254.232.526.425

#### EVALUASI TRIWULAN IV RKPD PROV. KALTIM 2019

Data yang ditampilkan bersumber dari data pada aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bridge System Provinsi Kalimantan Timur. Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa selisih pagu yang tercantum pada kolom selisih, merupakan nilai pagu yang perlu dialokasikan pada tahun 2020 - 2023 agar pagu Renstra-PD yang disusun dapat konsisten dengan pagu dalam RPJMD 2019 - 2023.

Lebih lanjut tentang pagu masing-masing PD, dibawah ini disampaikan data konsistensi pagu RPJMD/Renstra-PD dengan RKPD/Renja-PD, dan APBD untuk Tahun 2019.

**Tabel 3.4**  
**Pagu RENSTRA-PD, RKPD, RENJA-PD, dan APBD**  
**Pada Setiap PD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019**

No	Perangkat Daerah	Pagu			Selisih Pagu		
		Renstra 2019	Renja 2019	APBD 2019	Renstra - Renja	Renstra - APBD	Renja - APBD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	Badan Kepegawaian Daerah	20.550.000.000,00	6.407.600.000,00	20.547.000.000,00	14.142.400.000,00	-3.000.000,00	14.139.400.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.636.400.000,00	4.586.400.000,00	6.636.400.000,00	2.050.000.000,00	0,00	2.050.000.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.515.400.000,00	3.245.400.000,00	6.015.400.000,00	270.000.000,00	2.500.000.000,00	2.770.000.000,00
4	Badan Pendapatan Daerah	47.918.292.000,00	37.868.292.000,00	47.918.292.000,00	10.050.000.000,00	0,00	10.050.000.000,00
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	3.803.100.000,00	3.753.100.000,00	3.803.100.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	45.389.920.000,00	27.677.320.000,00	45.389.920.000,00	17.712.600.000,00	0,00	17.712.600.000,00
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.813.000.000,00	6.350.650.000,00	30.050.000.000,00	24.462.350.000,00	-763.000.000,00	23.699.350.000,00
8	Badan Penghubung Provinsi	9.200.200.000,00	7.106.400.000,00	9.200.200.000,00	2.093.800.000,00	0,00	2.093.800.000,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48.050.000.000,00	35.820.360.000,00	48.050.000.000,00	12.229.640.000,00	0,00	12.229.640.000,00
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	17.861.800.000,00	14.650.000.000,00	17.861.800.000,00	3.211.800.000,00	0,00	3.211.800.000,00
11	Dinas Kehutanan	297.205.957.750,00	117.160.000.000,00	297.205.957.750,00	180.045.957.750,00	0,00	180.045.957.750,00
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	44.630.495.000,00	29.960.850.000,00	44.630.495.000,00	14.669.645.000,00	0,00	14.669.645.000,00

N o	Perangkat Daerah	Pagu			Selisih Pagu		
		Renstra 2019	Renja 2019	APBD 2019	Renstra - Renja	Renstra - APBD	Renja - APBD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.671.072.000,00	4.326.050.000,00	8.671.072.000,00	4.345.022.000,00	0,00	4.345.022.000,00
14	Dinas Kesehatan	116.142.099.000,00	50.653.551.000,00	116.142.099.000,00	65.488.548.000,00	0,00	65.488.548.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.550.000.000,00	7.763.200.000,00	12.550.000.000,00	4.786.800.000,00	0,00	4.786.800.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup	18.052.648.000,00	16.000.000.000,00	18.052.648.000,00	2.052.648.000,00	0,00	2.052.648.000,00
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	45.695.627.000,00	38.182.677.000,00	45.695.627.000,00	7.512.950.000,00	0,00	7.512.950.000,00
18	Dinas Pariwisata	12.817.000.000,00	11.767.000.000,00	12.817.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.172.127.665.750,00	1.122.609.350.000,00	1.172.127.665.750,00	49.518.315.750,00	0,00	49.518.315.750,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	7.050.000.000,00	5.869.000.000,00	7.050.000.000,00	1.181.000.000,00	0,00	1.181.000.000,00
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	34.381.000.000,00	30.327.750.000,00	34.381.000.000,00	4.053.250.000,00	0,00	4.053.250.000,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.924.535.000,00	7.874.535.000,00	9.924.535.000,00	2.050.000.000,00	0,00	2.050.000.000,00
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	891.688.980.675,00	399.666.075.875,00	891.892.980.675,00	492.022.904.800,00	204.000.000,00	492.226.904.800,00
24	Dinas Perhubungan	41.780.446.500,00	77.390.650.000,00	41.780.446.500,00	-35.610.203.500,00	0,00	-35.610.203.500,00
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	31.722.281.000,00	98.867.946.000,00	31.722.281.000,00	-67.145.665.000,00	0,00	-67.145.665.000,00
26	Dinas Perkebunan	32.897.850.000,00	32.068.850.000,00	32.897.850.000,00	829.000.000,00	0,00	829.000.000,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	5.275.000.000,00	3.619.200.000,00	5.275.000.000,00	1.655.800.000,00	0,00	1.655.800.000,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	32.167.900.000,00	23.659.850.000,00	32.167.900.000,00	8.508.050.000,00	0,00	8.508.050.000,00
29	Dinas Sosial	19.150.000.000,00	16.100.000.000,00	20.950.777.200,00	3.050.000.000,00	1.800.777.200,00	4.850.777.200,00
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.050.000.000,00	22.390.000.000,00	20.050.000.000,00	-2.340.000.000,00	0,00	-2.340.000.000,00

#### EVALUASI TRIWULAN IV RKPD PROV. KALTIM 2019

No	Perangkat Daerah	Pagu			Selisih Pagu		
		Renstra 2019	Renja 2019	APBD 2019	Renstra - Renja	Renstra - APBD	Renja - APBD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
31	Inspektorat	15.012.840.000,00	6.603.500.000,00	15.012.840.000,00	8.409.340.000,00	0,00	8.409.340.000,00
32	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	486.680.840.000,00	464.000.000.000,00	486.680.840.000,00	22.680.840.000,00	0,00	22.680.840.000,00
33	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	235.498.000.000,00	262.710.779.663,00	235.498.000.000,00	27.212.779.663,00	0,00	27.212.779.663,00
34	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	35.832.515.750,00	30.371.700.000,00	35.832.515.750,00	5.460.815.750,00	0,00	5.460.815.750,00
35	Satuan Polisi Pamong Praja	10.925.852.500,00	7.875.852.500,00	10.925.852.500,00	3.050.000.000,00	0,00	3.050.000.000,00
36	Sekretariat Daerah	172.032.304.000,00	67.362.000.000,00	172.032.304.000,00	104.670.304.000,00	0,00	104.670.304.000,00
37	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	6.700.000.000,00	3.000.000.000,00	4.050.000.000,00	3.700.000.000,00	2.650.000.000,00	1.050.000.000,00
38	Sekretariat DPRD	96.025.000.000,00	45.000.000.000,00	96.025.000.000,00	51.025.000.000,00	0,00	51.025.000.000,00
TOTAL		4.146.426.021.925,00	3.150.645.889.038,00	4.147.514.799.125,00	995.780.132.887,00	1.088.777.200,00	996.868.910.087,00

Catatan : Pagu yang dimuat adalah akumulasi dari pagu seluruh program pada masing-masing PD untuk setiap dokumen.

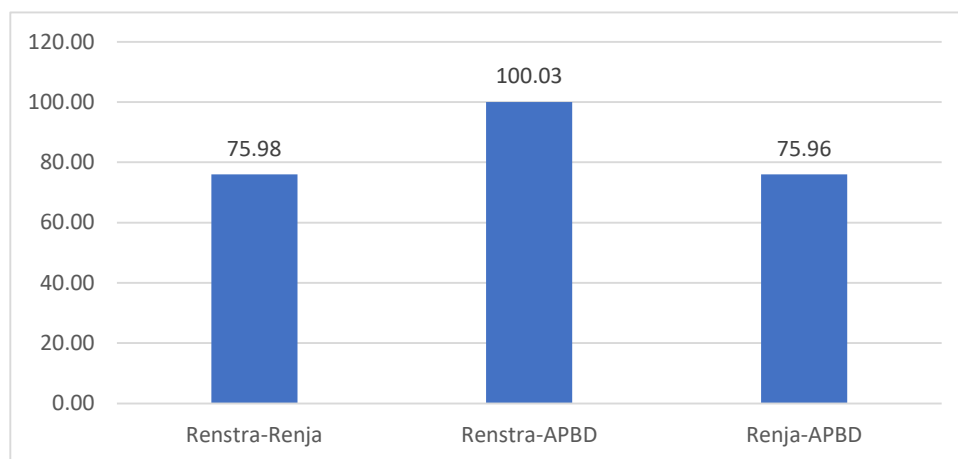
RKPD merupakan penjabaran RPJMD dan disusun dengan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. Oleh karena itu perbedaan pagu antara RPJMD dan RKPD dimungkinkan apabila kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kondisi yang berbeda dengan waktu yang diperhitungkan pada saat penyusunan RPJMD.

Beberapa informasi yang diperoleh dengan melihat gambaran pada tabel 3 antara lain adalah sebagai berikut:

- Sebanyak 1 (satu) PD yang memiliki alokasi pagu RKPD lebih besar dibanding pagu Renstra-PD/RPJMD sebagaimana tercantum dalam kolom 6;
- Sebanyak 4 (empat) PD memiliki pagu APBD lebih kecil dari pagu Renstra-PD/RPJMD dan sebanyak 2 (dua) PD memiliki pagu APBD lebih besar dari pagu Renstra-PD/RPJMD;
- Seluruh PD telah memiliki pagu yang sama antara RKPD dan Renja-PD nya;

- d. Sebagian besar PD mengalokasikan pagu APBD lebih besar dari pagu RKPD/Renja-PD nya, kecuali 1 (satu) PD yang memiliki pagu APBD lebih kecil dari pagu RKPD/Renja-PD yaitu: Disnakertrans.

Adapun konsistensi pagu antar dokumen ditunjukkan pada gambar berikut ini.



**Gambar 3.2**  
**Konsistensi Pagu Antar Dokumen Tahun 2019**

Gambar di atas menunjukkan bahwa alokasi pagu pada APBD menunjukkan nilai lebih besar dari RKPD dan Renstra-PD Tahun 2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase alokasi pagu APBD yang telah melebihi 100% dari alokasi pagu Renstra, serta alokasi pagu Renja yang lebih kecil dibanding alokasi pagu Renstra.

### **3.3 KONSISTENSI PELAKSANAAN KEGIATAN RENSTRA-PD**

Salah satu hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra-PD. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD.

Konsistensi pelaksanaan kegiatan Renstra-PD tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Konsistensi Kegiatan Renstra-PD ke dalam RKPD, RENJA-PD, dan APBD PD**  
**Dilingkungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019**

No	Perangkat Daerah	Jumlah			Konsistensi			In - Konsistensi		
		Renstra	RKPD/ Renja 2019	APBD 2019	Renstra - Renja	Renstra - APBD	Renja - APBD	Renstra - Renja	Renstra - APBD	Renja - APBD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Badan Kepegawaian Daerah	24	24	24	9	24	9	30	0	30
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	16	18	16	18	16	2	0	2
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	9	9	9	9	9	2	2	0
4	Badan Pendapatan Daerah	19	19	19	19	19	19	0	0	0
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	14	13	14	13	14	13	1	0	1
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	32	31	31	31	31	31	1	1	0
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16	16	15	16	15	15	0	1	1
8	Badan Penghubung Provinsi	13	13	13	13	13	13	0	0	0
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29	26	26	24	24	26	7	7	0
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	23	23	23	22	22	23	2	2	0
11	Dinas Kehutanan	58	52	58	48	58	48	14	0	14
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	28	27	28	27	28	27	1	0	1
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22	20	22	20	22	20	2	0	2
14	Dinas Kesehatan	35	25	35	24	35	24	12	0	12
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	29	5	29	5	29	5	24	0	24
16	Dinas Lingkungan Hidup	30	29	30	29	30	29	1	0	1
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	30	28	31	27	30	27	4	1	5
18	Dinas Pariwisata	10	10	10	10	10	10	0	0	0
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	33	31	33	31	33	31	2	0	2
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	25	25	25	25	25	25	0	0	0
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	18	10	18	9	18	9	10	0	10
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19	19	19	19	19	19	0	0	0
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	64	33	55	33	55	32	31	9	24
24	Dinas Perhubungan	18	18	18	18	18	18	0	0	0
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	28	24	28	22	28	22	8	0	8
26	Dinas Perkebunan	39	41	39	38	39	38	4	0	4
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	12	10	12	9	11	10	4	2	2
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	25	23	25	21	23	23	6	4	2
29	Dinas Sosial	20	19	20	18	20	18	3	0	3
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23	25	23	17	23	17	14	0	14
31	Inspektorat	20	14	14	14	14	14	6	6	0
32	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	8	3	8	3	8	3	5	0	5
33	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	7	3	4	3	4	2	4	3	3
34	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	10	8	10	5	10	5	8	0	8

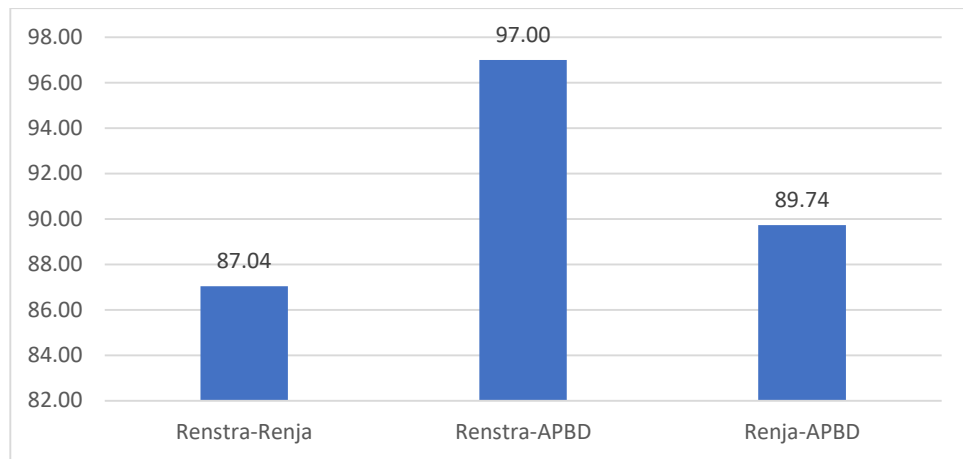
#### EVALUASI TRIWULAN IV RKPD PROV. KALTIM 2019

No	Perangkat Daerah	Jumlah			Konsistensi			In - Konsistensi		
		Renstra	RKPD/ Renja 2019	APBD 2019	Renstra - Renja	Renstra - APBD	Renja - APBD	Renstra - Renja	Renstra - APBD	Renja - APBD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
35	Satuan Polisi Pamong Praja	15	15	15	15	15	15	0	0	0
36	Sekretariat Daerah	83	84	83	81	83	81	5	0	5
37	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	12	8	8	7	8	7	6	4	2
38	Sekretariat DPRD	14	14	14	14	14	14	0	0	0
TOTAL		934	813	906	764	899	767	219	42	185

Tabel diatas menunjukkan komposisi jumlah kegiatan pada masing-masing PD pada setiap dokumen. Dengan melihat tabel tersebut, diperoleh gambaran antara lain :

- Jumlah kegiatan dalam Renstra-PD sebanyak 934 kegiatan, pada RKPD/RenjaPD 2019 sebanyak 813 kegiatan, dan APBD sebanyak 906 kegiatan;
- Kegiatan yang telah sesuai antara Renstra-PD dan RKPD/Renja-PD sebanyak 764 kegiatan, seluruh kegiatan antara RKPD dan Renja-PD telah sesuai, dan sebanyak 767 kegiatan telah sesuai antara RKPD/Renja-PD dan APBD;
- Seluruh kegiatan dalam Renja-PD/RKPD sudah termuat dalam Renstra-PD;
- Sebanyak 219 kegiatan dalam Renstra-PD tidak termuat dalam Renja-PD/RKPD;
- Seluruh kegiatan dalam RKPD/Renja-PD telah dialokasikan dalam APBD, dan masih terdapat sebanyak 185 kegiatan dalam APBD yang tidak terdapat dalam Renja-PD/RKPD;
- Indikator dan target kegiatan yang dimuat pada masing-masing dokumen masih ditemukan perbedaan pada beberapa PD.

Adapun konsistensi kegiatan antar dokumen ditunjukkan pada gambar berikut ini.



**Gambar 3.3**  
**Konsistensi Kegiatan Antar Dokumen Tahun 2019**

### **3.4 CAPAIAN KINERJA RPJMD DAN RKPD**

Capaian kinerja RPJMD diperoleh dari pelaksanaan RKPD setiap tahun. Oleh karena itu, konsistensi penjabaran RPJMD ke dalam RKPD sangat mempengaruhi pencapaian kinerja RPJMD.

Sebelum menilai capaian kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui informasi tentang realisasi keuangan Renstra-PD, Renja-PD dan APBD sebagai berikut.



**Tabel 3.6**  
**Realisasi Keuangan RPJMD, RKPD Perubahan, dan APBD Perubahan**  
**PD pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Triwulan IV Tahun 2019**

No	Perangkat Daerah	Pagu Renstra 2019	Realisasi TW IV			Pagu Renja Perubahan 2019	Realisasi TW IV			Pagu APBD Perubahan 2019	Realisasi TW IV		
			% Fisik	Keuangan (Rp)	% Keuangan		% Fisik	Keuangan (Rp)	% Keuangan		% Fisik	Keuangan (Rp)	% Keuangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1	Badan Kepegawaian Daerah	20.550.000.000	135,10	18.501.608.397	90,03	26.050.000.000	135,10	18.501.608.397	71,02	26.035.000.000	97,11	18.501.608.398	71,06
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.636.400.000	98,71	7.156.404.493	107,84	7.636.400.000	98,71	7.156.404.493	93,71	7.566.400.000	98,27	7.156.404.493	94,58
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.515.400.000	91,95	4.170.531.896	118,64	6.815.400.000	91,95	4.170.531.896	61,19	6.775.350.000	62,05	4.170.531.896	61,55
4	Badan Pendapatan Daerah	47.918.292.000	93,82	50.501.235.308	105,39	56.901.042.000	93,82	50.501.235.308	88,75	56.753.542.000	97,20	50.501.235.309	88,98
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	3.803.100.000	94,05	4.369.807.399	114,90	4.803.100.000	94,05	4.369.807.399	90,98	4.745.425.350	96,72	4.373.907.399	92,17
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	45.389.920.000	63,15	40.491.032.732	89,21	51.449.865.501	63,15	40.491.032.732	78,70	52.719.598.501	73,69	40.459.946.672	76,75
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.050.000.000	85,90	22.854.135.106	76,05	31.700.000.000	85,17	23.580.807.152	74,39	31.700.000.000	88,81	23.580.807.152	74,39
8	Badan Penghubung Provinsi	9.200.200.000	80,23	16.228.706.800	176,40	17.238.950.000	80,23	16.228.706.800	94,14	17.206.950.000	95,08	16.221.031.600	94,27
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48.050.000.000	98,41	49.919.883.860	103,89	53.950.000.000	98,06	51.845.086.027	96,10	55.286.100.000	96,71	51.845.086.027	93,78
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	17.861.800.000	100,62	18.739.370.468	104,91	19.817.255.600	100,62	18.739.370.468	94,56	19.837.255.600	99,95	18.739.370.468	94,47
11	Dinas Kehutanan	297.205.957.750	81,80	166.802.370.012	56,12	474.408.980.424	81,80	166.802.370.012	35,16	474.715.980.424	39,77	173.111.627.816	36,47
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	44.630.495.000	95,25	42.896.656.120	96,12	50.640.188.680	95,25	42.896.656.120	84,71	48.140.188.680	98,43	42.923.837.121	89,16
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.349.372.000	97,49	10.776.087.394	129,06	18.501.072.000	97,49	10.776.087.394	58,25	11.571.072.000	99,03	10.776.087.394	93,13

No	Perangkat Daerah	Pagu Renstra 2019	Realisasi TW IV			Pagu Renja Perubahan 2019	Realisasi TW IV			Pagu APBD Perubahan 2019	Realisasi TW IV		
			% Fisik	Keuangan (Rp)	% Keuangan		% Fisik	Keuangan (Rp)	% Keuangan		% Fisik	Keuangan (Rp)	% Keuangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
14	Dinas Kesehatan	116.794.099.000	81,62	60.116.188.625	51,47	122.005.835.350	81,62	60.116.188.625	49,27	122.005.835.351	56,21	60.116.188.625	49,27
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.550.000.000	97,35	14.841.459.594	118,26	16.250.000.000	97,35	14.841.459.594	91,33	16.185.500.000	95,92	14.841.459.594	91,70
16	Dinas Lingkungan Hidup	18.052.648.000	98,71	15.661.489.096	86,75	19.898.648.000	98,33	15.918.699.296	80,00	18.894.148.000	97,42	15.918.699.296	84,25
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	45.695.627.000	97,10	44.875.971.694	98,21	48.072.026.250	96,39	45.028.791.694	93,67	48.289.526.250	97,02	45.028.791.694	93,25
18	Dinas Pariwisata	12.817.000.000	73,33	12.244.880.442	95,54	12.817.000.000	73,33	12.244.880.442	95,54	12.817.000.000	71,71	12.244.880.442	95,54
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.172.127.665.750	90,20	985.945.981.575	84,12	1.372.748.140.232	90,20	985.945.981.575	71,82	1.348.516.940.232	88,93	985.984.513.660	73,12
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	7.050.000.000	99,75	8.738.343.780	123,95	9.050.000.000	99,75	8.738.343.780	96,56	9.050.000.000	98,57	8.738.343.780	96,56
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	34.381.000.000	94,55	39.727.135.330	115,55	39.381.000.000	94,55	39.727.135.330	100,88	44.790.897.400	79,24	39.727.135.331	88,69
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.924.535.000	91,36	10.171.209.667	102,49	11.182.435.000	91,36	10.171.209.667	90,96	11.029.035.000	95,84	10.171.209.667	92,22
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	891.688.980.675	86,06	540.887.460.974	60,66	1.060.509.826.037	83,82	830.173.128.018	78,28	1.047.551.226.035	73,17	838.454.555.284	80,04
24	Dinas Perhubungan	41.780.446.500	88,24	23.707.137.724	56,74	43.913.836.500	88,24	23.707.137.724	53,99	43.913.836.500	56,02	23.707.137.724	53,99
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	31.722.281.000	102,94	29.097.699.620	91,73	32.120.281.000	103,16	27.149.277.126	84,52	31.960.281.000	97,82	29.097.699.620	91,04
26	Dinas Perkebunan	32.897.850.000	102,23	31.018.141.117	94,29	33.397.850.000	102,23	31.018.141.117	92,87	33.656.580.000	100,57	31.022.629.039	92,17
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	5.275.000.000	97,28	6.500.840.466	123,24	7.113.662.750	97,51	6.705.789.826	94,27	7.067.833.950	98,32	6.705.789.826	94,88
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	32.167.900.000	98,67	25.003.433.539	77,73	33.721.056.000	98,78	29.966.041.869	88,86	33.023.140.000	96,52	30.238.855.249	91,57
29	Dinas Sosial	19.150.000.000	99,43	20.044.896.749	104,67	21.150.000.000	99,43	20.044.896.749	94,77	21.150.000.000	99,59	20.044.896.749	94,77

No	Perangkat Daerah	Pagu Renstra 2019	Realisasi TW IV			Pagu Renja Perubahan 2019	Realisasi TW IV			Pagu APBD Perubahan 2019	Realisasi TW IV		
			% Fisik	Keuangan (Rp)	% Keuangan		% Fisik	Keuangan (Rp)	% Keuangan		% Fisik	Keuangan (Rp)	% Keuangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.050.000.000	98,84	22.259.868.792	111,02	25.857.500.000	98,84	22.259.868.792	86,09	25.857.500.000	95,45	22.259.868.792	86,09
31	Inspektorat	15.012.840.000	99,89	7.114.272.444	47,39	16.042.840.000	99,94	15.736.965.409	98,09	16.042.840.000	99,93	15.736.965.409	98,09
32	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	486.028.840.000	85,04	585.991.225.877	120,57	576.324.471.311	85,04	585.991.225.877	101,68	582.374.471.311	95,05	585.991.225.877	100,62
33	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	235.498.000.000	99,44	282.511.041.393	119,96	279.548.194.100	99,90	282.462.552.393	101,04	284.548.194.100	99,58	282.511.041.393	99,28
34	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	35.832.515.750	92,68	48.894.502.087	136,45	51.135.718.694	92,68	48.894.502.087	95,62	52.335.718.694	96,25	48.894.502.087	93,42
35	Satuan Polisi Pamong Praja	10.925.852.500	90,66	13.149.510.896	120,35	13.925.852.500	90,66	13.149.510.896	94,43	13.798.011.500	93,42	13.149.510.896	95,30
36	Sekretariat Daerah	172.032.304.000	80,17	187.826.137.654	109,18	209.604.500.000	80,17	187.826.137.654	89,61	210.015.000.000	94,99	188.915.128.348	89,95
37	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	4.050.000.000	99,39	5.140.168.754	126,92	5.350.000.000	99,30	5.090.168.754	95,14	5.250.000.000	97,92	5.140.168.754	97,91
38	Sekretariat DPRD	96.025.000.000	94,33	122.485.226.139	127,56	122.766.000.000	94,33	122.485.226.139	99,77	127.856.000.000	99,29	122.485.226.139	95,80
TOTAL		4.142.691.321.925	93,57	3.597.362.054.012	86,84	5.003.798.927.929	93,48	3.901.452.964.630	77,97	4.981.032.377.876	89,94	3.919.487.905.019	78,69

Catatan :  
Pagu Renstra-PD Tahun 2019 yang dimuat dalam kolom 3 adalah pagu berdasarkan pagu tahun pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Dari tabel 5 diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

- a. Realisasi keuangan RPJMD/Renstra-PD Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 adalah Rp. 3.597.362.054.012,- atau 86,84% (belanja langsung);
- b. Realisasi keuangan RKPD/Renja-PD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 adalah Rp. 3.901.452.964.630,- atau 77,97%;
- c. Realisasi keuangan APBD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 adalah Rp.3.919.487.905.019,- atau 78,69%.

Sedangkan capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja RKPD Perubahan dan RPJMD**  
**PD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Triwulan IV Tahun 2019**

No	Perangkat Daerah	Realisasi TW IV Tahun ke-1 RPJMD 2019 – 2023 (%)		Realisasi TW IV RKPD Perubahan 2019 (%)	
		K	Keuangan	K	Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Badan Kepegawaian Daerah	135,10	90,03	135,10	71,02
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98,71	107,84	98,71	93,71
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	91,95	118,64	91,95	61,19
4	Badan Pendapatan Daerah	93,82	105,39	93,82	88,75
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	94,05	114,90	94,05	90,98
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	63,15	89,21	63,15	78,70
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,90	76,05	85,17	74,39
8	Badan Penghubung Provinsi	80,23	176,40	80,23	94,14
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	98,41	103,89	98,06	96,10
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	100,62	104,91	100,62	94,56
11	Dinas Kehutanan	81,80	56,12	81,80	35,16
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan	95,25	96,12	95,25	84,71
13	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	97,49	129,06	97,49	58,25
14	Dinas Kesehatan	81,62	51,47	81,62	49,27
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	97,35	118,26	97,35	91,33
16	Dinas Lingkungan Hidup	98,71	86,75	98,33	80,00
17	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	97,10	98,21	96,39	93,67
18	Dinas Pariwisata	73,33	95,54	73,33	95,54
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	90,20	84,12	90,20	71,82
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	99,75	123,95	99,75	96,56
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga	94,55	115,55	94,55	100,88

No	Perangkat Daerah	Realisasi TW IV Tahun ke-1 RPJMD 2019 – 2023 (%)		Realisasi TW IV RKPD Perubahan 2019 (%)	
		K	Keuangan	K	Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	91,36	102,49	91,36	90,96
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86,06	60,66	83,82	78,28
24	Dinas Perhubungan	88,24	56,74	88,24	53,99
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	102,94	91,73	103,16	84,52
26	Dinas Perkebunan	102,23	94,29	102,23	92,87
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	97,28	123,24	97,51	94,27
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	98,67	77,73	98,78	88,86
29	Dinas Sosial	99,43	104,67	99,43	94,77
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	98,84	111,02	98,84	86,09
31	Inspektorat	99,89	47,39	99,94	98,09
32	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda	85,04	120,57	85,04	101,68
33	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	99,44	119,96	99,90	101,04
34	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	92,68	136,45	92,68	95,62
35	Satuan Polisi Pamong Praja	90,66	120,35	90,66	94,43
36	Sekretariat Daerah	80,17	109,18	80,17	89,61
37	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur	99,39	126,92	99,30	95,14
38	Sekretariat DPRD	94,33	127,56	94,33	99,77
TOTAL		93,57	86,84	93,48	77,97

Rata-rata capaian kinerja PD diperoleh dari rata-rata realisasi kegiatan seluruh program. Sedangkan rata-rata setiap program dihitung berdasarkan realisasi pelaksanaan seluruh kegiatan pada program tersebut.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran antara lain:

- Rata-rata capaian kegiatan PD pada Triwulan IV Tahun 2019 adalah 93,48% (untuk pencapaian target *output*) dan 77,97% (untuk pencapaian kinerja keuangan);
- Rata-rata capaian kinerja kegiatan Renstra-PD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 adalah 93,57% (untuk pencapaian target *output*) dan 86,84% (untuk pencapaian kinerja keuangan);
- Semakin tidak bisa diukur indikator dan target kinerja kegiatan, maka semakin bias capaian kinerja yang dihasilkan. Semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam APBD yang tidak tercantum dalam dokumen rencana (RPJMD dan RKPD), maka semakin kecil realisasi keuangan suatu dokumen rencana (RPJMD dan RKPD).

---

### **3.5 PELAKSANAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN**

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Evaluasi pembangunan daerah dilakukan dengan menilai kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV Tahun 2019 menurut bidang urusan dapat digambarkan dengan data sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Triwulan IV Tahun 2019**

No	Bidang Urusan	Total Pagu Renstra (RPJMD 2019 - 2023)	Pagu dan Realisasi Anggaran								Rata-rata capaian Kinerja (%)			
			Pagu Renstra 2019 (Tahun ke - 1 RPJMD 2019 - 2023)		Realisasi Keuangan RPJMD/Renstra 2019 (TW IV)	%	Pagu Renja Perubahan 2019		Realisasi Keuangan RKPD/Renja Perubahan 2019 (TW IV)	%	RKPD Perubahan TW IV 2019		RPJMD Tahun Ke - 1 (TW IV 2019)	
											K	Rp	K	Rp
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	22.215.195.114.345	2.967.409.713.675	69,77	2.536.423.501.902	85,48	3.499.995.498.224	69,95	2.826.338.148.496	80,75				
1	Pendidikan	4.840.434.501.195	880.900.940.675	20,71	529.120.686.861	60,07	1.048.705.486.037	20,96	818.406.353.906	78,04	83,28	78,04	85,38	60,07
2	Kesehatan	4.536.541.727.900	874.153.454.750	20,55	976.835.489.432	111,75	1.029.014.219.455	20,57	977.464.468.982	94,99	85,57	94,99	85,68	111,75
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.416.644.759.943	1.125.072.315.750	26,45	942.899.899.542	83,81	1.304.803.796.232	26,08	942.899.899.542	72,26	89,22	72,26	89,22	83,81
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.132.546.472.807	47.055.350.000	1,11	43.046.082.033	91,48	67.944.344.000	1,36	43.046.082.033	63,35	100,00	63,35	100,00	91,48
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	140.877.652.500	21.077.652.500	0,5	24.476.447.285	116,13	28.377.652.500	0,57	24.476.447.285	86,25	94,28	86,25	94,28	116,13
6	Sosial	148.150.000.000	19.150.000.000	0,45	20.044.896.749	104,67	21.150.000.000	0,42	20.044.896.749	94,77	99,43	94,77	99,43	104,67
B	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	1.556.133.926.940	322.085.646.100	7,57	206.373.341.114	64,07	249.761.238.100	4,99	208.131.663.029	83,33				
7	Tenaga Kerja	129.165.250.000	129.165.250.000	3,04	21.028.435.412	16,28	23.655.000.000	0,47	21.028.435.412	88,90	97,29	88,90	97,29	16,28
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	48.634.372.000	8.349.372.000	0,2	10.379.153.364	124,31	18.084.922.000	0,36	10.379.153.364	57,39	97,26	57,39	97,26	124,31
9	Pangan	125.891.720.860	22.743.573.600	0,53	23.157.994.595	101,82	24.963.222.850	0,50	23.157.994.595	92,77	95,63	92,77	95,63	101,82
10	Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Lingkungan Hidup	105.325.248.000	18.052.648.000	0,42	15.661.489.096	86,75	19.898.648.000	0,40	15.918.699.296	80,00	98,33	80,00	98,71	86,75
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	55.121.000.000	7.050.000.000	0,17	8.738.343.780	123,95	9.050.000.000	0,18	8.738.343.780	96,56	99,75	96,56	99,75	123,95
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.821.700.000	321.700.000	0,01	396.934.030	123,39	416.150.000	0,01	396.934.030	95,38	99,78	95,38	99,78	123,39

No	Bidang Urusan	Total Pagu Renstra (RPJMD 2019 - 2023)	Pagu dan Realisasi Anggaran								Rata-rata capaian Kinerja (%)			
			Pagu Renstra 2019 (Tahun ke - 1 RPJMD 2019 - 2023)		Realisasi Keuangan RPJMD/Renstra 2019 (TW IV)	%	Pagu Renja Perubahan 2019		Realisasi Keuangan RKPD/Renja Perubahan 2019 (TW IV)	%	RKPD Perubahan TW IV 2019		RPJMD Tahun Ke - 1 (TW IV 2019)	
											K	Rp	K	Rp
15	Perhubungan	436.780.446.500	41.780.446.500	0,98	23.707.137.724	56,74	43.913.836.500	0,88	23.707.137.724	53,99	88,24	53,99	88,24	56,74
16	Komunikasi dan Informatika	96.011.000.000	12.550.000.000	0,3	14.841.459.594	118,26	16.250.000.000	0,32	14.841.459.594	91,33	97,35	91,33	97,35	118,26
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	130.129.466.000	21.704.081.000	0,51	19.610.656.298	90,35	22.066.081.000	0,44	19.610.656.298	88,87	97,72	88,87	97,72	90,35
18	Penanaman Modal	75.924.535.000	9.924.535.000	0,23	10.171.209.667	102,49	11.182.435.000	0,22	10.171.209.667	90,96	91,36	90,96	91,36	102,49
19	Kepemudaan dan Olah Raga	222.457.930.580	34.381.000.000	0,81	39.727.135.330	115,55	39.381.000.000	0,79	39.727.135.330	100,88	94,55	100,88	94,55	115,55
20	Statistik	3.364.000.000	-	-	-	-	1.981.940.000	0,04	1.981.940.000	100,00	93,81	100,00	-	-
21	Persandian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kebudayaan	76.517.580.000	10.788.040.000	0,25	11.766.774.113	109,07	11.804.340.000	0,24	11.766.774.113	99,68	93,15	99,68	93,15	109,07
23	Perpustakaan	38.970.905.000	4.837.042.000	0,11	6.035.627.224	124,78	6.482.984.750	0,13	6.240.576.584	96,26	98,33	96,26	98,15	124,78
24	Kearsipan	6.018.773.000	437.958.000	0,01	1.150.990.887	262,81	630.678.000	0,01	465.213.242	73,76	93,40	73,76	93,40	262,81
C	Urusan Pilihan	2.878.039.784.840	471.263.756.150	11,08	329.141.305.500	69,84	660.011.084.104	13,19	332.155.491.336	50,33				
25	Kelautan dan Perikanan	273.257.082.620	44.630.495.000	1,05	42.896.656.120	96,12	50.640.188.680	1,01	42.896.656.120	84,71	95,25	84,71	95,25	96,12
26	Pariwisata	73.817.000.000	12.817.000.000	0,3	12.244.880.442	95,54	12.817.000.000	0,26	12.244.880.442	95,54	73,33	95,54	73,33	95,54
27	Pertanian	541.295.018.470	88.017.803.400	2,07	77.739.551.756	88,32	90.070.959.400	1,80	82.702.160.085	91,82	100,46	91,82	100,47	88,32
28	Kehutanan	1.610.066.188.750	297.205.957.750	6,99	166.802.370.012	56,12	474.408.980.424	9,48	166.802.370.012	35,16	81,80	35,16	81,80	56,12
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	306.218.430.000	17.861.800.000	0,42	18.739.370.468	104,91	19.817.255.600	0,40	18.739.370.468	94,56	100,62	94,56	100,62	104,91
30	Perdagangan	45.298.535.000	6.862.400.000	0,16	6.473.117.905	94,33	4.938.000.000	0,10	4.524.695.411	91,63	120,04	91,63	116,40	94,33
31	Perindustrian	23.528.780.000	3.155.800.000	0,07	3.013.925.417	95,50	5.116.200.000	0,10	3.013.925.417	58,91	77,91	58,91	77,91	95,50
32	Transmigrasi	4.558.750.000	712.500.000	0,02	1.231.433.380	172,83	2.202.500.000	0,04	1.231.433.380	55,91	109,15	55,91	109,15	172,83
D	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.515.964.025.000	492.081.656.000	11,57	525.432.214.592	106,78	593.874.357.501	11,87	534.731.579.603	90,04				
33	Kesekretariatan Daerah	1.410.797.520.000	279.907.504.000	6,58	330.301.114.177	118,00	353.480.770.000	7,06	330.251.114.177	93,43	82,89	93,43	83,04	118,00
34	Pengawasan	75.064.200.000	15.012.840.000	0,35	7.114.272.444	47,39	16.042.840.000	0,32	15.736.965.409	98,09	99,94	98,09	99,89	47,39



No	Bidang Urusan	Total Pagu Renstra (RPJMD 2019 - 2023)	Pagu dan Realisasi Anggaran								Rata-rata capaian Kinerja (%)			
			Pagu Renstra 2019 (Tahun ke - 1 RPJMD 2019 - 2023)		Realisasi Keuangan RPJMD/Renstra 2019 (TW IV)	%	Pagu Renja Perubahan 2019		Realisasi Keuangan RKPD/Renja Perubahan 2019 (TW IV)	%	RKPD Perubahan TW IV 2019		RPJMD Tahun Ke - 1 (TW IV 2019)	
											K	Rp	K	Rp
35	Perencanaan	240.250.000.000	48.050.000.000	1,13	49.919.883.860	103,89	51.968.060.000	1,04	49.919.883.860	96,06	98,41	96,06	98,41	103,89
36	Keuangan	508.095.453.000	93.308.212.000	2,19	90.992.268.040	97,52	108.350.907.501	2,17	90.992.268.040	83,98	74,81	83,98	74,81	97,52
37	Kepegawaian	109.724.588.000	21.950.000.000	0,52	19.880.733.567	90,57	27.528.680.000	0,55	19.880.733.567	72,22	133,61	72,22	133,61	90,57
38	Pendidikan dan Pelatihan	149.929.164.000	30.050.000.000	0,71	22.854.135.106	76,05	31.700.000.000	0,63	23.580.807.152	74,39	85,17	74,39	85,90	76,05
39	Penelitian dan Pengembangan	22.103.100.000	3.803.100.000	0,09	4.369.807.399	114,90	4.803.100.000	0,10	4.369.807.399	90,98	94,05	90,98	94,05	114,90
Total		29.165.332.851.125	4.252.840.771.925		3.597.370.363.107	84,59	5.003.642.177.929		3.901.356.882.463	77,97				

---

Tabel di atas menggambarkan pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain yang dapat diuraikan adalah :

- a. Terdapat 24 (dua puluh empat) bidang urusan yang memiliki pagu kurang dari 1% (satu persen) dari total pagu Tahun ke - 1 RPJMD 2019 - 2023 (Renstra 2019). Sedangkan untuk RKPD tahun 2019, terdapat 26 (dua puluh enam) bidang urusan yang memiliki pagu kurang dari 1% (satu persen) dari total pagu RKPD Tahun 2019;
- b. Pagu anggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kesehatan, dan pendidikan dalam RPJMD 2019 - 2023 memiliki alokasi pagu lebih dari 20% total anggaran;
- c. Terdapat bidang urusan yang tidak memiliki alokasi anggaran dalam Renstra dan RKPD Tahun 2019 yaitu urusan pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil serta persandian;
- d. Pagu anggaran urusan wajib pelayanan dasar, bukan pelayanan dasar, pilihan, dan pemerintahan fungsi penunjang dalam Renstra 2019 masing-masing sebesar 69,77%, 7,57%, 11,08%, 11,57%, sedangkan dalam RKPD Tahun 2019 adalah 69,95%, 4,99%, 13,19%, dan 11,87%;
- e. Urusan pada RKPD 2019 yang memiliki realisasi keuangan tertinggi pada Triwulan IV adalah urusan pemerintahan fungsi penunjang sebesar 90,04%, sedangkan realisasi terendah adalah urusan pilihan sebesar 50,33%.

---

**BAB IV**

**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG  
PELAKSANAAN RKPD PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2019**

---

**4.1 FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2019**

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2019 dan ditinjau dari sisi faktor penghambat pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Masa transisi penyusunan periode RPJMD tahun 2013-2018 ke periode RPJMD tahun 2019-2023 menyebabkan beberapa program dan kegiatan yang terdapat pada dokumen RKPD/Renja dan APBD masih terdapat ketidak selarasan dengan program dan kegiatan pada dokumen RPJMD/Renstra;
- b. Perubahan jadwal kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang terkait dengan perubahan jadwal kegiatan Kementerian terkait di tingkat pusat;
- c. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan sehingga menyebabkan inkonsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan, tidak terkecuali pada tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- d. Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program kegiatan dari kementerian terkait;
- e. Keterbatasan sumberdaya aparatur dimasing-masing Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran terkait dalam perumusan target kinerja dan evaluasi;
- f. Daya serap anggaran rendah karena masih terdapat permasalahan pergeseran/revisi anggaran, keterlambatan pengadaan barang dan jasa atau lelang, kondisi iklim dan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan pada saat merencanakan, pembebasan tanah atau lahan belum dapat dilaksanakan dengan cepat serta konflik sosial lainnya.

---

## **4.2 FAKTOR PENDORONG PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2019**

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2019 dan ditinjau dari sisi faktor pendorong pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan upaya menggali potensi penambahan pendapatan daerah;
- b. Percepatan penyelesaian penetapan status kelembagaan unit pelayanan teknis beberapa perangkat daerah;
- c. Percepatan penyelesaian masalah pembebasan lahan dan masalah sosial.

## **4.3 TARGET DAN REALISASI PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 terdapat sebanyak 70 program prioritas. Seluruh program prioritas tersebut terbagi habis kedalam PD sebagai penanggung jawab pencapaiannya.

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, target dan realisasi program prioritas RPJMD di-update setiap triwulan. Target dan capaian tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Target dan Realisasi Program Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur**  
**Triwulan IV Tahun 2019**

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal (Akhir Tahun 2018)	Target RPJMD (Tahun 2019)	Realisasi RPJMD (Tahun 2019)	Realisasi Capaian Kinerja TW IV Tahun 2019		PD Penanggung Jawab Program
						Capaian	%	
-1	-2	-6	-7	-8	-9	-14	-15	-14
1	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Penggunaan Hak Hak Politik Masyarakat (%)	67,18	68	61,38	97,58	96,72	Bakesbangpol
2	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah sekolah yang mengembangkan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB)	72	90	-	-	-	Disdikbud
3	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal	17	90	77	86,28	93,13	Disdikbud
4	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	30	0	-	-	-	Disdikbud
5	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	68,23	0,69	100%	68,45	90,90	Disdikbud
6	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	68,23	0,69	100%	61,94	94,28	Disdikbud
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	95	0,96	96	94,06	94,83	Disdikbud
8	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi (orang)	791	6500	2178	99,98	94,55	Disdikbud
9	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah (Siswa)	635	2500	6952	64,82	58,51	Disdikbud
10	Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	0	85	-	-	-	Disdikbud
11	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	60	65	65	99,76	99,23	Disdikbud
12	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	70	76	76	100	92,99	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	2447	366200	133472	98,13	99,46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal (Akhir Tahun 2018)	Target RPJMD (Tahun 2019)	Realisasi RPJMD (Tahun 2019)	Realisasi Capaian Kinerja TW IV Tahun 2019		PD Penanggung Jawab Program
						Capaian	%	
-1	-2	-6	-7	-8	-9	-14	-15	-14
14	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya (%)	50	60	88,5	84,26	57,91	Dinas Kesehatan
15	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	6	15	16	93,94	89,87	Dinas Kesehatan
16	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	87,5	87,5	10,38	30	16,45	Dinas Kesehatan
17	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP) (%)	34	37	37	100	88,23	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Rasio KDRT	0,066	0,06	-	-	-	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Orang)	300	1000		99,68	93,79	Dinas Sosial
20	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas (%)	0	32	-	100	98,85	Dinas Sosial
21	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	0	10%	-	94,81	86,19	Dinas Pemuda dan Olahraga
22	Program Peningkatan Upaya Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang Berwirausaha (%)	0,03	0,09	0	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
23	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	80%	80	-	87,98	83,19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
24	Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM	Jumlah Koperasi yang berkualitas	0	0	-	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Jumlah UKM Naik Kelas	0	0	-			
25	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	302	15	15	100	99,76	DPMPD
26	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Meningkatkan jumlah desa berkembang (Desa)	125	15	-	100	99,24	DPMPD

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal (Akhir Tahun 2018)	Target RPJMD (Tahun 2019)	Realisasi RPJMD (Tahun 2019)	Realisasi Capaian Kinerja TW IV Tahun 2019		PD Penanggung Jawab Program
						Capaian	%	
-1	-2	-6	-7	-8	-9	-14	-15	-14
27	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	63	73	-	97,44	94,24	DPMPD
28	Program Kampung Iklim	Jumlah kampung/desa (Desa)	28	20	-	-	-	DPMPD
29	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya	2 Kawasan	3 Kawasan	KPP pesisir (kutim) KPP kawasan sedang berkembang (Kukar dan Berau)	72,30	98,61	Dinas Pariwisata
30	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	0,52	1	0,32	41,26	93,71	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
31	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan	15	14 Hari	-	92,20	85,72	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri	0	7 perusahaan industri baru	-	99,26	93,88	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Padi	383,958	403.000 Ton	61.788 Ton	98	91,71	DPTPH
34	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	226,017	233.020 Ton	179,455	100	99,95	DPTPH
35	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)	-	118.5 Konstanta	123,9	92,86	85,73	Dinas Peternakan
		Jumlah Miniranch yang terregister	0	5 Unit	5	92,86	85,73	
36	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi (%)	19	20	0,07	99,90	92,28	Dinas Peternakan
		Calving Interval (bulan)	-	18	19,2	99,90	92,28	
37	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	-	74.060 Ton	59917	-	-	Dinas Perkebunan
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	-	16.717.254 ton	14.067.789	-	-	
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	-	3307 ton	2,435	-	-	
		Produksi Komoditi Perkebunan (Lada)	-	5849 ton	6,757	-	-	

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal (Akhir Tahun 2018)	Target RPJMD (Tahun 2019)	Realisasi RPJMD (Tahun 2019)	Realisasi Capaian Kinerja TW IV Tahun 2019		PD Penanggung Jawab Program
						Capaian	%	
-1	-2	-6	-7	-8	-9	-14	-15	-14
		Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa)	-	12.468 Ton	8,591	-	-	
		Produksi komoditas perkebunan	13.249.959	16.812.938 Ton	14.145.562,06	99,67	89,72	
38	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	98	4.08 Juta ton CO2eq	98	100	95,38	Dinas Perkebunan
39	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi	0	30 Perusahaan	32	100	97,01	Dinas Perkebunan
40	Program Peningkatan Mutu Dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	1,87	2	-	-	-	Dinas Perkebunan
41	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	149.039 Ton	152.027 Ton	152.233	96,78	89,86	Dinas Kelautan dan Perikanan
42	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	151.918 Ton	154.956 Ton	155.000	99,57	96,12	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Angka Konsumsi Ikan	-	50 Kg/Kapita	52,28	-	-	
43	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	0 Kawasan	1 Kawasan yang di restorasi	1	98,09	89,51	Dinas Kelautan dan Perikanan
44	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	2,5 Miliar Ekor	2,6 Miliar Ekor	2,5 Miliar Ekor	100	90,66	Dinas Kelautan dan Perikanan (UPTD. Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar)
45	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi Penerimaan PNBK Sektor Kehutanan	-	160 Miliar Rupiah	154 Miliar	94,28	91,34	Dinas Kehutanan
46	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase tutupan lahan Meningkat	-	13.98 %	5,66	92,23	86,61	Dinas Kehutanan
47	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	-	2 persen	0,77	89,03	77,29	Dinas Kehutanan
48	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	-	32.000 Ha	31.368	96,31	93,23	Dinas Kehutanan
49	Program Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	-	0	-	-	-	Badan Pendapatan Daerah



No	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal (Akhir Tahun 2018)	Target RPJMD (Tahun 2019)	Realisasi RPJMD (Tahun 2019)	Realisasi Capaian Kinerja TW IV Tahun 2019		PD Penanggung Jawab Program
						Capaian	%	
-1	-2	-6	-7	-8	-9	-14	-15	-14
50	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	854	683 Kasus	854	99,08	88,96	Dinas Perhubungan
51	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (83%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (83%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (83%)	86,08	82,26	Dinas Perhubungan
52	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	52,85	54,3	55	96,15	66,63	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
53	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku (L/detik)	7,922	7,922	7,922	93,90	72,31	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
54	Program Pembangunan Infrastruktur Keciaptakarya	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	60,23	62,23	65,25	79,28	70,89	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
55	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	51,722	46,722	47,140	100	83,65	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat
56	Program Diversifikasi Energi	Persentase pemanfaatan EBT (%)	3,13	3,38	3,38	94,27	85,47	DESDM
57	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik (KK)	945,607	965,607	977,202	100	96,71	DESDM
58	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan	-	0	75	96,19	86,78	DLH
59	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	-	500	-	-	-	DLH
60	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	87	87	85	15	15,43	BPBD
61	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	60	60% atau 12 desa (Berdasarkan renstra 0)	60	100	98,58	BPBD
62	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota (%)	63,19	64,87	66,46	94,93	88,36	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal (Akhir Tahun 2018)	Target RPJMD (Tahun 2019)	Realisasi RPJMD (Tahun 2019)	Realisasi Capaian Kinerja TW IV Tahun 2019		PD Penanggung Jawab Program
						Capaian	%	
-1	-2	-6	-7	-8	-9	-14	-15	-14
63	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	71,05	73	73,68	81,68	72,86	Biro Organisasi (SETDA)
64	Program Penguatan Kelembagaan	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	86	87	84	67,21	94,36	Biro Organisasi (SETDA)
65	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran (%)	78,53	80	89,42	97,87	93,43	Bappeda
66	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	49	50	49	96,53	93,49	Biro Organisasi (SETDA)
67	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	52,63	60,53	15	89,89	88,11	Biro Organisasi (SETDA)
68	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	2,6	2,6	92,69	89,21	Diskominfo
69	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Level kapasitas APIP	2	3	3	100	99,91	Inspektorat
70	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Hasil Penilaian Integritas	60	65	65	100	99,79	Inspektorat

Pencapaian target pada tahun 2019 perlu mendapat perhatian oleh setiap PD dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD, agar visi dan misi Gubernur tercapai dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat. Secara berkala, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pencapaian target outcome RPJMD.

---

## BAB V

# KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

---

### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Triwulan IV RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2019 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesesuaian RPJMD/Renstra dengan RKPD/Renja pada tahun 2019 sebesar 93,75%, terdapat 381 program yang sesuai, 44 program RPJMD yang tidak direncanakan dalam RKPD;
2. Kesesuaian RKPD/Renja dengan APBD tahun 2019 telah mencapai 95,82%, terdapat 382 program yang sesuai, 33 program yang dianggarkan dalam APBD tetapi tidak terdapat dalam RKPD;
3. Rata-rata capaian kinerja kegiatan RKPD pada Triwulan IV Tahun 2019 sebesar 93,48% (untuk pencapaian target *output*) dan 77,97% (untuk pencapaian kinerja keuangan);
4. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan diantaranya :
  - *Permasalahan daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah*
    - Dokumen perencanaan dengan penganggaran belum sepenuhnya konsisten karena keterbatasan sumberdaya aparatur di masing-masing perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran terkait dalam perumusan target kinerja dan pendanaan;
    - Belum maksimalnya capaian kinerja baik fisik maupun keuangan yang disebabkan antara lain; belum semua Perangkat Daerah menyampaikan laporan bulanan tepat waktu; Perangkat Daerah belum cermat dalam memasang target fisik dan keuangan dan cenderung memasang terlalu tinggi, kurang memperhatikan metode pengadaan dalam menyusun DPA, adanya pergeseran perubahan belanja dari belanja langsung menjadi belanja tidak langsung dari dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK);

keterlambatan pembuatan administrasi dan banyaknya kegiatan yang baru dilaksanakan di triwulan berikutnya karena jadwal kegiatan yang diundur sebagai akibat dari keterlambatan aturan yang mendukung; serta masih ada kegiatan yang dalam proses lelang ulang karena kesalahan spesifikasi teknis dan tidak adanya rekanan yang memenuhi syarat;

- Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah belum optimal karena belum jelasnya status kelembagaan unit pelaksana teknis di beberapa perangkat daerah yang belum mendapatkan persetujuan Mendagri;
  - Keterbatasan anggaran untuk pencapaian target standar pelayanan minimal di beberapa perangkat daerah akibat dari menurunnya pendapatan, dan dari pendapatan yang tersedia sebagian besar anggaran belanja diperuntukkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pekerjaan kontrak tahun jamak yang harus tuntas ditahun 2018. Terutama pada pemenuhan target pembangunan infrastruktur dalam upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang dilaksanakan dengan pola Kegiatan Tahun Jamak sesuai dengan **Permendagri No. 21 Tahun 2011**, dimana diamanatkan bahwa jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui masa jabatan kepala daerah.
- *Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya*
- Perubahan jadwal kegiatan perangkat daerah yang terkait dengan perubahan jadwal kegiatan kementerian terkait di tingkat pusat;
  - Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan antara perencanaan dengan pelaksanaan;
  - Penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian terkait yang terlambat.

## 5.2 REKOMENDASI (UPAYA TINDAK LANJUT)

Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Triwulan IV RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2019 maka direkomendasikan untuk ditindak lanjuti beberapa hal tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan upaya menggali potensi penambahan pendapatan daerah;

2. Percepatan penyelesaian masalah pembebasan lahan dan masalah sosial;
  3. Meningkatkan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan yang fokus pada tujuan dan sasaran program kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan pelaporan yang tepat waktu didukung data akurat dan lengkap;
  4. Penyesuaian indikator program dan kegiatan pada masing-masing dokumen RPJMD, RKPD dan APBD;
  5. Penyusunan dokumen perencanaan ditahun 2019 yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan beberapa hal mendasar lainnya, meliputi :
    - Merencanakan upaya peningkatan potensi penambahan pendapatan daerah, untuk pencapaian target standar pelayanan minimal pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;
    - Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional antara lain terkait dengan Pelaksanaan Kebijakan Nasional dalam rangka kemudahan berusaha melalui penerapan OSS (*Online Single Submission*), Pemenuhan cadangan pangan daerah, pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) khususnya Pembangunan Bendungan Marangkayu dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditugaskan untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah;
- Penambahan target kinerja antara untuk Pemenuhan target pembangunan infrastruktur dalam upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Pemenuhan kebutuhan rutin perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, Penanganan prasarana jalan yang mengalami longsoran (bencana alam), penanganan banjir dan pemeliharaan jalan dalam upaya untuk mencapai kondisi jalan baik pada ruas-ruas jalan provinsi.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044 <http://bappeda.kaltimprov.go.id>,  
e-mail : [mail@bappedakaltim.com](mailto:mail@bappedakaltim.com)